



RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, sehingga Rancangan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) BPKAD ini disusun berdasarkan pada Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 dan memperhatikan hasil Forum OPD BPKAD Tahun sebelumnya.

Semoga Rancangan Renja BPKAD ini bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan aktivitas tugas pokok dan fungsi BPKAD sebagai instansi penunjang yang tentunya juga akan bersama-sama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2025. Masukan dan Saran yang membangun sangat kami perlukan demi perbaikan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Cimahi. 24 Juli 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Cimahi,



HARJONO, S.Pd. M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	28
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja	3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2023	7-13
Tabel 2.2	Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	14-19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2023	20
Tabel 2.4	Data Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD 2017-20223	22
Tabel 2.5	Data Ketercapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan BPKAD Tahun 2018-2023	22
Tabel 4.1	Rencana Kerja BPKAD Tahun 2025	29 - 41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka dijelaskan dalam secara garis besar dokumen perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua bagian besar:

1. Rencana Pembangunan Daerah
2. Rencana Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama perencanaan yaitu : RPJPD, RPJMD, RKPD. Pada Tahun 2025 penyusunan RKPD Kota Cimahi masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dikarenakan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah baru dilaksanakan di tahun 2024. sedangkan pada Rencana Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) dokumen utama perencanaan yaitu : Renstra dan Renja.

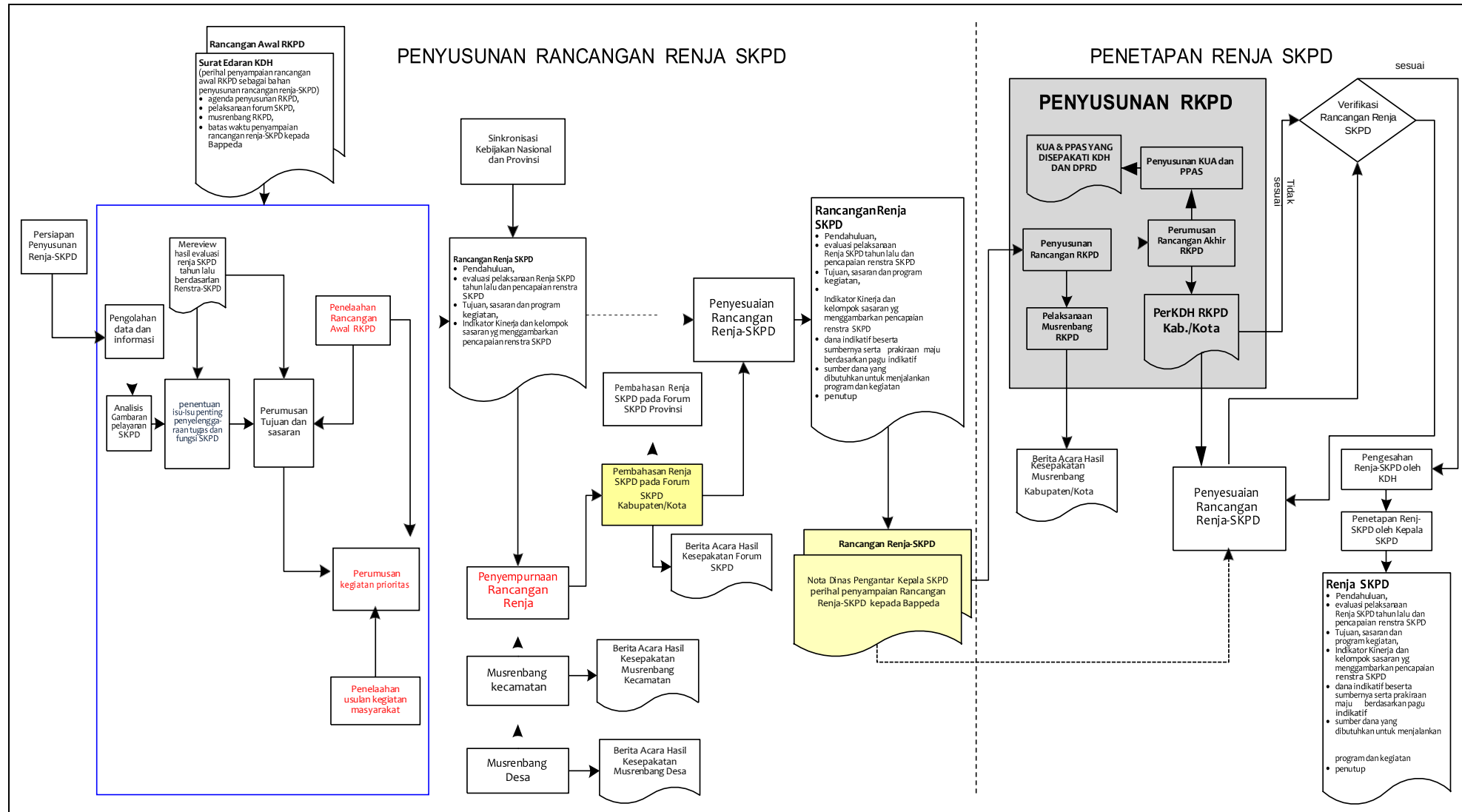
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan satu dari 30 SKPD di Kota Cimahi yang wajib menyusun dokumen perencanaan yaitu Renstra dan Renja BPKAD, dimana renja tahun 2025 merupakan penjabaran dokumen tahunan atas rencana strategis yang disusun berdasarkan RPD 2023-2026, sehingga dalam renja akan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana pada tahun 2025 ini merupakan 2 tahun terakhir dari tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2023-2026.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Tema yang diangkat di tahun 2025 adalah **“Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**. Tema tersebut diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cimahi yang sejalan dengan Visi Kota Cimahi yaitu mewujudkan “Cimahi Kota CERDAS”. Dengan Misi yang diampu adalah Misi Dua yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, maka untuk melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi menyusun program kerja dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659);

11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Nomor 199);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 745, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 225).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2025, meliputi :

- **BAB I** PENDAHULUAN
- **BAB II** HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- **BAB III** TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- **BAB IV** RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- **BAB V** PENUTUP

BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja BPKAD Kota Cimahi adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan, program, indikator dan sasaran yang telah disusun dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP).

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kota Cimahi

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi capaian program dankegiatan s/dakhir tahun 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	Nilai LKIP	100%	100%
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen 1 Kegiatan	8 Dokumen 1 Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Forum OPD Renja, RKA,RKA-P, DPA, DPPA, MR BPKAD	6 Dokumen 1 Kegiatan	6 Dokumen 1 Kegiatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP dan SKM	2 Dokumen	2 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Laporan dan 2 Dokumen	14 Laporan dan 2 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	14 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Saranadan Prasarana Penunjang	8 Paket 1 Kegiatan	8 Paket 1 Kegiatan
Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor beserta Pemeliharaannya	3 Paket	3 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan-bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas	12 Laporan	12 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya arsip Dinamis	12 Dokumen	12 Dokumen
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website BPKAD dan Sosialisasi Naskah Dinas Elektronik	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang	2 Unit	2 Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	2 Unit	2 Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	2 Paket	2 Paket
Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terfasilitasinya kebutuhan kantor	1 Paket	1 Paket
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan	3 Paket	3 Paket

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	21 Unit	21 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	21 Unit	21 Unit
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu, Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Utilitas Aset	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	140 Dokumen dan 1 Kegiatan	140 Dokumen dan 1 Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan hasil asistensi/verifikasi RKA	30 Dokumen	30 Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Perubahan RKA SKPD	Jumlah laporan hasil asistensi/verifikasi Perubahan RKA	30 Dokumen	30 Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	30 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen pedoman umum APBD	2 Dokumen	2 Dokumen

	dan SK Pengelola Keuangan		
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah laporan koordinasi perencanaan belanja	Dokumen	Dokumen
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan Pembiayaan	Dokumen	Dokumen
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan	1 Kegiatan / 40 orang	1 Kegiatan/ 40 orang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Perbendaharaan Yang Disusun Tepat Waktu	402 Dokumen, 12 Laporan, 1 Kegiatan	402 Dokumen, 12 Laporan, 1 Kegiatan
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	36 Dokumen	36 Dokumen
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)	240 Dokumen	240 Dokumen
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Perimbangan	5 Dokumen	5 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran	120 Dokumen	120 Dokumen

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang mengikuti pembinaan /Laporan Pembinaan	200 orang/ 1 kegiatan	200 orang/ 1 kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP	25 Dokumen 6 Laporan/ 30 orang dan 15 lembaga BLUD	25 Dokumen 6 Laporan/ 30 orang dan 15 lembaga BLUD
Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Laporan Bulanan,Triwulan,Semesteran, Rekonsiliasi Akun dan Validasi Transaksi	20 Dokumen	20 Dokumen
Koordinasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Jumlah Laporan Keuangan Pemda Kota Cimahi	3 Laporan	3 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Rerbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan PP APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Kebijakan dan Penduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	Jumlah Modul Kebijakan Akuntansi / Sistem akuntansi Pemda Kota Cimahi	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi/ Laporan Sosialisasi Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	30 orang/ 1 Laporan	30 orang/ 1 Laporan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti pembinaan/ Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan BLUD	15 lembaga/ 1 Laporan	15 lembaga/ 1 Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Penggunaan BTT	3 Laporan	3 Laporan
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembayaran Bunga Pinjaman Bank Dunia	2 Laporan	2 Laporan
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pelaksanaan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	1 Laporan	1 Laporan
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Utilitas Aset	70%	99%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	26 Dokumen 6 Kegiatan	26 Dokumen 6 Kegiatan

Penyusunan Standar Harga	Tersedianya dokumen SSH dan Perubahan SSH Kota Cimahi tahun 2023	2 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya kebijakan pengelolaan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penatausahaan BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Inventarisasi BMD	3 Dokumen	3 Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Sertifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen
Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen penilaian Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian BMD	1 Kegiatan	1 Kegiatan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Berita Acara Rekonsiliasi BMD	4 Dokumen	4 Dokumen
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengurus Barang Perangkat Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan

Selain itu capaian kinerja dapat dilihat melalui realisasi keuangan dan fisik dari belanja BPKAD yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan
BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2023	
1	2	3	
	Rp	K	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	14,267,740,956.00		5,602,919,929.00
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,315,063,195.00	97.84	1,286,657,969.00
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72,502,915.00	96.01	69,608,300.00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	68,000,888.00	98.07	66,685,100.00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	208,039,050.00	98.90	205,740,400.00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	157,686,644.00	97.80	154,213,000.00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	18,376,600.00	99.84	18,346,600.00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	24,059,040.00	88.21	21,222,500.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	249,128,643.00	96.52	240,470,400.00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	89,492,430.00	97.54	87,289,500.00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	133,047,239.00	98.82	131,475,300.00

Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	86,656,639.00	99.43	86,162,669.00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	58,976,171.00	98.63	58,167,500.00
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	149,096,936.00	98.78	147,276,700.00
			-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		74.29	257,309,320.00
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24,391,600.00	74.61	18,198,400.00
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	31,275,600.00	78.76	24,631,350.00
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	35,818,300.00	75.13	26,912,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36,008,900.00	42.13	15,168,950.00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	33,219,500.00	42.05	13,968,150.00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	56,260,300.00	81.18	45,673,070.00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	129,376,800.00	87.15	112,757,400.00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		92.78	742,491,601.00

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	31,828,200.00	95.61	30,430,850.00
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	464,585,550.00	91.27	424,046,451.00
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	66,243,750.00	99.90	66,179,100.00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	32,615,300.00	95.91	31,282,300.00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	87,117,600.00	87.49	76,217,000.00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33,967,750.00	99.13	33,670,600.00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	40,737,000.00	98.67	40,196,400.00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	25,116,400.00	89.11	22,382,400.00
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	18,086,500.00	100.00	18,086,500.00
			-
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		27.32	3,177,257,670.00
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	500,000,000.00	34.08	170,419,912.00

Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11,128,006,211.00	27.02	3,006,837,758.00
			-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		78.19	139,203,369.00
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	178,022,500.00	78.19	139,203,369.00
			-
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		82.56	1,528,462,066.00
			-
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,851,371,500.00	82.56	1,528,462,066.00
Penyusunan Standar Harga	113,526,000.00	87.36	99,178,100.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	93,365,100.00	99.84	93,216,100.00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20,426,600.00	73.58	15,030,600.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	229,816,700.00	98.17	225,607,400.00
Inventarisasi Barang Milik Daerah	134,982,500.00	74.59	100,677,496.00
Pengamanan Barang Milik Daerah	689,948,500.00	96.20	663,703,900.00
Penilaian Barang Milik Daerah	290,000,000.00	21.61	62,656,370.00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	24,096,100.00	99.79	24,046,100.00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	110,634,200.00	91.22	100,917,200.00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15,000,000.00	100.00	15,000,000.00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	129,575,800.00	99.11	128,428,800.00

Pemerintah Kabupaten/Kota			
			-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70.28	56,132,150.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,136,900.00	94.16	17,077,900.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61,729,000.00	77.52	47,850,250.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,932,823,109.00	65.55	7,166,535,218.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,926,022,109.00	65.53	7,160,343,718.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,317,000.00	86.67	3,741,500.00
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2,484,000.00	98.63	2,450,000.00
			-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		88.03	40,205,879.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45,671,400.00	88.03	40,205,879.00
			-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84.48	25,550,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30,242,500.00	84.48	25,550,000.00
			-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	647,778,782.00	89.81	581,790,195.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162,692,922.00	87.85	142,921,055.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58,070,600.00	89.97	52,244,350.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,919,260.00	95.36	25,669,700.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297,290,000.00	92.33	274,476,622.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	81,406,000.00	82.77	67,378,468.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	21,400,000.00	89.25	19,100,000.00

Berbasis Elektronik pada SKPD			
			-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		98.11	728,562,900.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282,547,000.00	97.94	276,740,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460,070,000.00	98.21	451,822,900.00
			-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		78.83	12,759,451.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	5,400,000.00	44.80	2,419,451.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,786,600.00	95.86	10,340,000.00
			-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85.68	187,954,880.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	219,373,020.00	85.68	187,954,880.00
TOTAL BPKAD	28,833,670,767.00	55.25	15,930,872,668.00

Sumber : Laporan Kinerja BPKAD 2023, diolah

Capaian realisasi keuangan BPKAD sebesar 55,25% disebabkan oleh adanya penggabungan BPKAD dengan PPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dimana terdapat dana BTT sebesar Rp.11.128.006.211 dan memiliki realisasi yang rendah sebesar Rp. 3.006.837.758 atau 27.02% dikarenakan penggunaan BTT hanya digunakan berdasarkanajuan Perangkat Daerah yang membutuhkan.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan sasaran BPKAD. Persentase capaian kinerja diukur dari sasaran strategis BPKAD Tahun 2023 yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja BPKAD Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalnya Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1.	Persentase Penyusunan APBD yang tepat waktu	100%	100%	100%
		2.	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	100 %	100 %	100%
		3.	Rasio Utilisasi Aset Daerah Terhadap Total Aset Tetap Daerah	70%	99,33 %	142 %
Rata - Rata Capaian						114 %

Sumber : Laporan LKIP BPKAD 2023, diolah

2.1 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

Tantangan yang di hadapi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam Dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 salah satunya adalah : Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota. Hal ini dituangkan ke dalam arah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah dituangkan dalam Indikator Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya :

I. Penetapan APBD Tepat Waktu

Pemerintah Daerah Kota Cimahi setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kota Cimahi dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Cimahi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini dilakukan agar pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan dengan maksimal.

II. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator penting untuk menilai pengelolaan keuangan sebuah institusi pemerintah yaitu Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kota Cimahi dari Tahun 2015 sampai dengan 2023 adalah WTP

III. Rasio Utilisasi Aset

Semakin tinggi rasio utilisasi aset berarti semakin baik manajemen dalam memanfaatkan aset selain itu juga menunjukkan bahwa pengelolaan aset berjalan semakin efisien karena nilai tambah serta menghilangkan *opportunitiy loss* atas aset tersebut. Pada tahun 2023, Rasio Utilisasi Aset telah mencapai 99.33%. Objek utilisasi meliputi aset-aset tetap yang dimiliki oleh daerah. Aset tetap selalu memiliki porsi terbesar dengan nilai pertumbuhan yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.4
DATA KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPKAD TAHUN 2017-2023

INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Opini BPK (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Keterangan : RPD 2023-2026 Bappeda dan Renstra BPKAD

Tabel 2.5
DATA KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BPKAD TAHUN 2018-2023

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Dokumen Anggaran yang Tepat Waktu	75	100	75%	100%	80	80	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Dokumen Pelaporan yang Tepat Waktu	92	100	94%	100%	96	96	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Kelengkapan Dokumen Milik Daerah	92	N/A	94%	100%	96	N/A	60	66,7	70	99,33	72	71,83

Sumber Keterangan : Renstra BPKAD 2023-2026

1. **Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**
- a. Pelaksanaan Penatausahaan Aplikasi SIPD RI

b. Pengelolaan Keuangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan

c. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Cimahi

d. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
2. **Rekomendasi dan Catatan Strategis**
- a. Pelatihan dan Pendampingan dalam Penggunaan Aplikasi SIPD

b. Pembinaan dan Pelayanan Konsultansi terkait Pengelolaan Keuangan bagi SKPD

- c. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait Sertifikasi Tanah Aset Pemkot Cimahi
- d. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah secara rutin
- e. Terkelolanya dengan baik Penatausahaan BMD disemua SKPD
- f. Melaksanakan Kerjasama dengan beberapa *stakeholders* untuk Pengelolaan RKUD, Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Implementasi SP2D Online, Implementasi Pengelolaan Data Gaji, Penyusunan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Standar Biaya Umum, Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS, dan Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan PPAS

3. **Tantangan yang dihadapi BPKAD:**

Pertanahan di Kota Cimahi mengalami keterbatasan lahan, sehingga untuk pembelian-pembelian lahan terutama dengan luasan besar sulit terealisasi ditambah faktor lain seperti harga tanah dan kepemilikan tanah/lahan yang sering terjadi sengketa antara beberapa pihak. Tahun 2023, jumlah bidang Tanah yang tercatat dalam KIB A (Tanah) sebanyak 472 Bidang sedangkan yang sudah bersertifikat sebanyak 247 Bidang dan yang belum bersertifikat 225 bidang. Di Tahun 2023 sd triwulan III sebanyak 58 sertifikasi tanah yang telah terealisasi dan di tahun 2024 di rencanakan sebanyak 50 sertifikat yang akan diperoleh Pemerintah Kota Cimahi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan Program Prioritas Nasional. Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2025 memasuki masa transisi kepemimpinan dimana meneruskan tonggak kepemimpinan yang akan disesuaikan dengan visi, misi dan program kerja pemerintah yang baru hasil pemilihan tahun 2024. Tema rencana pembangunan nasional di tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan lima (5) agenda nasional yaitu: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, serta Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi.

Dititik ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodir program-program presiden terpilih dibutuhkan rencana kerja serta kebijakan fiskal untuk ketercapaian sasaran dan target pembangunan nasional, maka diperlukan juga kolaborasi dan sinergi yang baik dan kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah akan sejalan dengan Tema Pembangunan di Wilayah tersebut dan juga akan sinkron dengan Tema Pembangunan Nasional.

Upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk penguatan institusi di antaranya mengenai pengelolaan penganggaran dan belanja daerah secara lebih tepat dan akuntabel, walaupun secara komponen belanja daerah terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya, tetapi masih diperlukan perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih lambat.

Tahun 2025 merupakan masa transisi setelah dilaksanakannya pemilu serentak di Indonesia. Pada saat ini Pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat memperkuat dan menjawab pelbagai tantangan dari berbagai permasalahan yang akan muncul mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal, antara lain dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga harus terus digenjot dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai sumber-sumber penerimaan. Para pengelola keuangan di daerah juga didorong untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dikhususkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar serta memperbaiki alokasi belanja daerah di tengah dinamika kondisi ekonomi dunia yang tidak jelas dan tidak stabil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan setiap tahun dengan mempedomani pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Perumusan ini dimatangkan dengan dilakukannya Forum Perangkat Daerah sebagai bahan penyelarasan program-program yang ada di BPKAD dengan usulan dari hasil musrenbang kecamatan ataupun dengan pokok-pokok pikiran DPRD, selain juga sebagai penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja BPKAD sebagai pengkoordinasi di dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang keuangan dan aset daerah mendukung pada pencapaian visi kota “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”, yang diimplementasikan kedalam Misi 2

yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sasaran

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi pada Tahun 2025 adalah :

1. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Kedua sasaran di atas dapat terukur tingkat keberhasilannya melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase Penetapan APBD tepat waktu;
2. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Rasio Utilisasi Aset Daerah.
4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD

Pada Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan target Indikator Kinerja Utamanya Persentase Penetapan APBD tepat waktu yaitu 100%, Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 100%, Rasio Utilisasi Aset Daerah 75% dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi 82,00 (A) dimana target yang tuangkan dalam perencanaan 2023-2026 disetiap SKPD adalah 60,01 (B), tetapi target pada Renstra ini lebih rendah daripada pencapaian penilaian RB BPKAD di Tahun 2022 yaitu 82,66 (A) dan 2023 81,28 (A) sehingga untuk Tahun 2025 BPKAD menetapkan target kinerja untuk Reformasi Birokrasi sebesar 82,00 (A). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang berorientasi pada dampak atau

hasil, efektif, efisien dan akuntabel sehingga membawa dampak nyata dalam pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tujuan RB adalah menciptakan perubahan-perubahan pada area tertentu dalam birokrasi yang terdiri dari tiga sasaran reformasi birokrasi, yaitu

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

BPKAD sebagai badan yang memiliki fungsi koordinatif bukan sebagai pengampu RB Tematik, melainkan RB General dimana RB General lebih berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tata kelola internal, dan budaya birokrasi berAKHLAK dengan ditunjang oleh ASN yang profesional, sedangkan RB Tematik lebih kepada dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan Perekonomian di Kota Cimahi Tahun 2025 diarahkan pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan yang luas dan berkelanjutan. Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dalam mendanai pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di Kota Cimahi maka perlu mencari sumber-sumber penerimaan lainnya yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, CSR ataupun dengan adanya swadaya dari masyarakat.

Proyeksi Belanja dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dalam tahun yang sama serta kemampuan keuangan Kota Cimahi dalam menutup kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Prinsip Keseimbangan digunakan dalam kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana pertumbuhan belanja disusun sesuai dengan pertumbuhan pendapatan.

Arah Kebijakan Belanja Kota Cimahi

1. Pemenuhan Kebutuhan Wajib dan Mengikat
2. Penerapan Pelayanan Dasar melalui Pemenuhan SPM
3. Pencapaian Visi dan Misi RPD Kota Cimahi 2023-2026
4. Mendukung upaya pengendalian inflasi daerah
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kota Cimahi
6. Mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Besaran Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						39.274.170.500,00							49.251.041.500,00					
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						39.274.170.500,00							49.251.041.500,00					
	5	02				KEUANGAN						39.274.170.500,00							49.251.041.500,00					
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.65Nilai Anilai 50.6Nilai			76,00 Nilai 81.65 Nilai A nilai	12.593.584.750,00						81.65 Nilai A nilai 50.6 Nilai	20.201.041.500,00					
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun sesuai ketentuan	-			100 Persen	78.823.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	31.845.000,00					
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	68.535.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		23.115.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	10.288.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		8.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan yang terlaksana	-			100 Persen	10.649.126.650,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	19.209.600.683,00					
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	10.641.694.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		19.202.158.683,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.440.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		4.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.992.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		3.002.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Hasil Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 Persen	61.057.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	53.485.000,00	
	5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	61.057.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		53.485.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Terfasilitasi Pembinaan	-			100 Persen	98.240.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	10.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	22.800.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	75.440.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		10.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	377.601.300,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	529.833.000,00	
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	49.043.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		159.184.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	53.718.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		53.722.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.370.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		27.069.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	64.119.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		85.707.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	17.350.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		39.150.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	1.042.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD	-	129.261.817,00	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	500.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	200.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	342.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		129.261.817,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	20.516.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	20.516.000,00	
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	5.400.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		5.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	15.116.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		15.116.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	266.220.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD	-	216.500.000,00	
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	213.390.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh Pegawai BPKAD		216.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	52.830.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. 11. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, independen dan kesetaraan	Seluruh Pegawai BPKAD		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen			100 persen	23.369.322.800,00						100 persen	27.650.000.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	-			100 Persen	1.679.571.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	1.275.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	190.956.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		88.599.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	76.963.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		76.963.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	349.857.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		232.660.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				60 Dokumen	312.926.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		292.262.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	20.726.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		21.711.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	20.307.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		21.711.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	97.529.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		100.128.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	152.847.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		99.192.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	245.913.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		142.609.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				3 Dokumen	76.176.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		76.176.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	53.076.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		53.439.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				120 Orang	82.291.350,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		69.546.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perbendaharaan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	-			100 Persen	539.752.600,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	325.000.000,00	
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	52.610.200,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		56.613.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				480 Dokumen	64.997.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		30.727.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				7 Dokumen	59.996.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		35.331.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	32.473.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		36.478.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				120 Dokumen	29.673.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		33.673.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	49.995.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		50.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	250.005.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		82.175.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	-			100 Persen	774.998.800,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	800.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				22 Dokumen	34.677.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		34.677.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	392.438.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		417.438.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	71.823.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		71.823.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	36.441.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		36.442.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	69.308.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		69.308.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	61.810.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		61.810.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	53.268.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		53.268.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				15 Lembaga	28.746.950,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		28.747.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	26.484.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		26.484.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Urusan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun tepat waktu	-			100 Persen	20.175.000.000,00			-	-	BPKAD dan SKPD Pengampu	-	25.000.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	175.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	-	BPKAD dan SKPD Pengampu		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	20.000.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	BPKAD dan SKPD Pengampu		25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Bulan Keteraksesan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-			12 Bulan	199.999.900,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	250.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	199.999.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		250.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen			100 persen	3.311.262.950,00					100 persen	1.400.000.000,00		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan BMD (siklus BMD)	-			100 persen	3.311.262.950,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD	-	1.400.000.000,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	276.637.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		190.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	152.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		55.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	60.500.000,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				10 Laporan	922.585.350,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		75.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				3 Laporan	61.757.300,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		150.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	750.000.000,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		400.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	190.000.000,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		165.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				4 Laporan	42.200.200,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	250.000.000,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		185.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				5 Laporan	50.402.800,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		15.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				247 Orang	555.179.600,00	-	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Seluruh SKPD		100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H											39.274.170.500,00								49.251.041.500,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi sebagai dasar dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dan juga sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD di tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari tujuan instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi maupun dengan semua *stakeholders*.

